

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata). Dewasa ini, pariwisata memang sedang menjadi sebuah *trending topic* dalam setiap Negara. Pemerintah dari berbagai Negara tersebut saling berlomba-lomba untuk meningkatkan atau mengembangkan pariwisata yang diyakini memiliki potensi yang tinggi di Negaranya. Hal tersebut dilakukan karena mengingat manfaat-manfaat yang dapat diambil dari pengembangan sektor pariwisata.

Sesungguhnya pariwisata telah dimulai sejak dimulainya peradaban manusia itu sendiri, yang ditandai oleh adanya pergerakan manusia yang melakukan ziarah atau perjalanan agama lainnya. Tonggak-tonggak sejarah dalam pariwisata sebagai fenomena modern dapat ditelusuri dari perjalanan Marcopolo (1254-1324) yang menjelajahi Eropa sampai Tiongkok, untuk kemudian kembali ke Venesia, yang kemudian disusul oleh perjalanan Pangeran Henry (1394-1460), Christoper Colombus (1451-1506), dan Vasco De Gama (akhir abad XV). Pariwisata sebagai kegiatan ekonomi baru berkembang pada awal abad ke-19, dan sebagai industri Internasional, pariwisata dimulai tahun 1869 (Crick, 1989;

Graburn dan Jafari, 1991; Pitana dan Gayatri, 2005) dalam Pitana dan Diarta, (2009: 32).

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, fungsinya yang lain adalah sebagai berikut :

1. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata
2. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa
3. Memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja
4. Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
5. Mendorong pendayagunaan produksi nasional

Setiap orang sangat memerlukan wisata, mulai dari wisata yang tidak membutuhkan banyak biaya hingga wisata yang membutuhkan banyak biaya. Pada sebagian orang menganggap mengeluarkan banyak anggaran untuk berwisata tersebut merupakan suatu hal yang wajar. Mac Donald dalam Pitana dan Diarta (2009: 32) menyebutkan bahwa :

“Dengan wisata, orang-orang (wisatawan) tersebut dapat menghilangkan semua beban pekerjaannya untuk memuaskan atau membahagiakan diri (*pleasure*) dan untuk menghabiskan waktu luang (*leisure*). Dengan begitu, memposisikan pariwisata dalam kehidupan sehari-hari merupakan sebuah fenomena yang baru. Hal ini mulai terlihat sejak berakhirnya Perang Dunia II disaat mana pariwisata meledak dalam skala besar sebagai salah satu kekuatan sosial dan ekonomi”.

Pemerintah Indonesia pada saat ini sedang mengembangkan pariwisata Indonesia. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, tujuan perkembangan kepariwisataan di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
3. Menghapus kemiskinan
4. Mengatasi pengangguran
5. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
6. Memajukan kebudayaan
7. Mengangkat citra bangsa
8. Memupuk rasa cinta tanah air
9. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
10. Mempererat persahabatan antar bangsa

Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting bagi Indonesia. Pada tahun 2009, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah komoditi minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit. Devisa merupakan semua yang dapat digunakan sebagai transaksi pembayaran dengan luar negeri dan diakui oleh internasional. Salah satu fungsi

dari devisa adalah sumber pendapatan Negara. Berdasarkan data tahun 2010, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sebesar 7 juta lebih atau tumbuh sebesar 10,74% dibandingkan tahun sebelumnya, dan menyumbangkan devisa bagi negara sebesar 7.603,45 juta dolar Amerika Serikat. (Sumber : Wikipedia)

Salah satu sumber devisa dari pariwisata adalah dengan adanya wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Para wisatawan asing yang datang ke Indonesia tentu sangat membutuhkan alat pembayaran yang digunakan di tempat tersebut yang dalam hal ini adalah uang rupiah. Oleh karena itu, wisatawan asing tersebut akan menukarkan uang negaranya dengan uang rupiah. Untuk menarik wisatawan asing berkunjung ke Indonesia maka penataan obyek wisata yang ada di Indonesia juga harus dilaksanakan secara maksimal.

Pengelolaan kepariwisataan, kebijakan nasional, urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan di Indonesia diatur oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia. Untuk pengelolaan pariwisata di daerah, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenangnya kepada Pemerintah Daerah. Penyerahan wewenang kepada Pemerintah Daerah tersebut dilakukan untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memberdayakan daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui berbagai bidang, salah satunya melalui bidang pariwisata. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Untuk meningkatkan pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan berbagai upaya untuk hal tersebut. Visit Jawa Tengah adalah sebuah upaya mendorong atau mengembangkan pembangunan budaya dan pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang melibatkan seluruh stakeholder di provinsi ini. VJT dirancang sebagai upaya untuk menjadi sebuah titik kebangkitan budaya dan pariwisata Jawa Tengah di mata Indonesia maupun dunia. VJT diselenggarakan demi tercapainya visi mewujudkan Jateng sebagai pusat budaya dan destinasi unggulan pariwisata, baik bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara. Hal tersebut sangat baik dilakukan karena selain untuk memperkenalkan Jawa Tengah baik dalam negeri maupun luar negeri, hal tersebut juga dapat menambah pemasukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun bagi Pemerintah Daerah yang daerahnya memiliki potensi wisata.

Dalam rangka mewujudkan Program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Jepara sebagai bagian dari Jawa Tengah juga melakukan program yang sama dalam sektor pariwisata. Jepara terkenal dengan sebutan Kota Ukir, namun potensi Kabupaten Jepara tidak hanya ukiran. Kabupaten Jepara juga memiliki potensi pariwisata baik wisata alam, wisata buatan, maupun wisata budaya. Namun dari sekian banyak tempat wisata yang ada, Kabupaten Jepara menjadikan Taman Nasional Laut Karimunjawa sebagai tempat wisata unggulan di Kabupaten Jepara.

Kepulauan Karimunjawa merupakan Objek wisata bahari terpadu Taman Nasional Laut Karimunjawa ini merupakan salah satu kawasan wisata unggulan Kabupaten Jepara di tingkat regional bahkan internasional. Karimunjawa memiliki

keindahan alam bawah laut yang alami dan sangat menakjubkan, dengan aneka jenis terumbu karang yang paling lengkap di dunia, biota laut dan ikan karang beraneka warna, hamparan pasir putih di setiap pulau dari 27 pulau kecil di Selatan Pulau Jawa tersebut.

Potensi wisata di Kepulauan Karimunjawa sebenarnya sangat beragam, namun sampai saat ini pengelolaannya belum optimal. Pada saat ini yang menjadi unggulan hanya wisata bahari. Mengingat Kepulauan Karimunjawa dikelilingi oleh wilayah perairan dan memiliki keindahan terumbu karangnya, maka potensi wisata bahari tersebut menjadi sangat tinggi. Wisata bahari bukan merupakan satu-satunya wisata yang memiliki potensi yang sangat tinggi, wisata-wisata lain juga memiliki potensi yang tinggi apabila dikembangkan secara optimal. Pemerintah Daerah setempat seharusnya dapat melihat potensi wisata yang lain selain wisata bahari yang ada di Kepulauan Karimunjawa.

Menurut Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara sebagai Dinas yang memiliki kewenangan untuk mengelola pariwisata di Kabupaten Jepara memiliki peran yang penting untuk mengembangkan Obyek Wisata Kepulauan Karimunjawa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penulis memilih Kepulauan Karimunjawa sebagai fokus untuk penelitian karena Kepulauan Karimunjawa merupakan tujuan wisata baru di Jawa Tengah

khususnya di Jepara yang memiliki potensi setara dengan tujuan wisata bahari lain di Indonesia jika dikembangkan secara maksimal. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara dalam hal ini memiliki peran yang cukup besar untuk pengembangan Kepulauan Karimunjawa. Bidang Pengembangan Karimunjawa merupakan bidang khusus yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi yang menangani Kepulauan Karimunjawa.

Berbicara mengenai kinerja, Prawirosentono dalam Pasolong (2008: 176) menjelaskan kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan sesuai dengan moral dan etika, sehingga dalam hal ini Prawirosentono menekankan kinerja yang berkaitan pada hasil. Berkaitan dengan kinerja sebagai hasil kerja dari sebuah organisasi tentu kinerja yang telah dicapai harus dilakukan pelaporan ketercapaian kinerja terhadap tujuan organisasi yang telah ditentukan yang dalam hal ini telah dituangkan pada visi dan misi dari Dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Jepara.

Untuk mencapai misi yang telah ditetapkan, diperlukan program-program yang mendukung tercapainya misi tersebut. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara memiliki beberapa program untuk mendukung tercapainya misi. Program-program tersebut khususnya untuk pengembangan pariwisata Kepulauan Karimunjawa. Untuk target dan pencapaian program-program tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENGEMBANGAN KARIMUNJAWA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB. JEPARA
TAHUN 2013-2014

MISI	PROGRAM	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					
		2013		2014		2015	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Menyiapkan dan meningkatkan kualitas SDM Pelaku Wisata	Pembinaan Pelaku Wisata	50 Peserta	50 Peserta	50 Peserta	40 Peserta	50 Peserta	40 Peserta
Meningkatkan infrastruktur pendukung sarana dan prasarana	Pengadaan Wisma Wisata, Kapal Kaca, dan Rumah Adat	- 1 Gedung Wisma - 3 Kapal Kaca - 1 Rumah Adat	- 1 Gedung Wisma - 1 Rumah Adat	- 1 Gedung Wisma - 3 Kapal Kaca - 1 Rumah Adat	- 1 Kapal Kaca	- 1 Gedung Wisma - 3 Kapal Kaca - 1 Rumah Adat	-
	Pengadaan Destinasi Khusus di Karimunjawa	27 Pulau	-	27 Pulau	-	27 Pulau	-
Mengembangkan daya tarik wisata	Pentas Seni	12 Kali Pentas	-	12 Kali Pentas	3 Kali Pentas	12 Kali Pentas	3 Kali Pentas
	Event Sail	50 Peserta	20 Peserta	55 Peserta	20 Peserta	55 Peserta	20 Peserta
	Penciptaan kesenian khas Karimunjawa	1 Kesenian	1 Kesenian	1 Kesenian	-	1 Kesenian	-
	Pembuatan CD Profil	1000 Keping	-	1000 Keping	1500 Keping	1000 Keping	-
	Pesta Lomba di Karimunjawa	1 Obyek	1 Obyek	1 Obyek	1 Obyek	1 Obyek	1 Obyek
	Penunjang TIC (<i>Tourist Information Center</i>)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	Peningkatan media promosi	<i>Leaflet, Pameran, Website</i>	<i>Leaflet, Pameran, Website</i>	<i>Leaflet, Pameran, Website</i>	<i>Leaflet, Pameran, Website</i>	<i>Leaflet, Pameran, Website</i>	<i>Leaflet, Pameran, Website</i>
Meningkatkan peran serta dan keterlibatan masyarakat, termasuk dunia usaha dalam pengembangan pariwisata	Penunjang Organisasi Pelaku Wisata	5 Organisasi	5 Organisasi	6 Organisasi	5 Organisasi	6 Organisasi	5 Organisasi

Sumber : LAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat program-program yang mendukung tercapainya misi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara. Untuk misi yang pertama yaitu Menyiapkan dan meningkatkan kualitas SDM Pelaku Wisata. Program yang dilakukan adalah Pembinaan Pelaku wisata. Untuk target

setiap tahunnya selama tiga tahun yaitu 50 Peserta. Pada kenyataannya, setiap tahun peserta pembinaan kurang dari target yang telah ditentukan. Ini sangat berpengaruh dalam pengembangan sebuah pariwisata.

Untuk pencapaian misi yang kedua yaitu meningkatkan infrastruktur pendukung sarana dan prasarana ada beberapa program pendukung. Program yang pertama adalah Pengadaan Wisma Wisata, Kapal Kaca, dan Rumah Adat. Untuk program yang pertama ini hanya berjalan pada tahun pertama. Hal tersebut dikarenakan pengadaan ini berupa bangunan fisik. Untuk kapal kaca jumlahnya sangat kurang apabila digunakan untuk menampung wisatawan yang khususnya wisatawan yang menginap di Wisma wisata. Untuk program yang kedua yaitu pengadaan destinasi khusus pariwisata di Karimunjawa. Menurut tabel 1.1, hingga saat ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karimunjawa belum memiliki destinasi khusus di Karimunjawa.

Untuk misi yang ketiga yaitu mengembangkan daya tarik wisata. Ada beberapa program yang dilakukan untuk mengembangkan daya tarik wisata khususnya pariwisata di Karimunjawa. Beberapa program pada tabel 1.1 masih banyak yang belum tercapai secara penuh. Khususnya program untuk promosi juga belum tercapai. Untuk media promosi kurang beragam karena hanya melalui leaflet, pameran, dan website. Untuk pencapaian misi yang terakhir, dapat dilihat dalam tabel 1.1 untuk program pendukungnya sudah tercapai meskipun kurang dari jumlah target yang telah ditentukan..

Penulis telah melakukan penelitian pendahuluan, Praktek Kerja Lapangan (Magang) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, serta ikut terjun

langsung melihat keadaan di Karimunjawa atau lebih tepatnya melihat tempat-tempat yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara di Karimunjawa. Penulis juga telah melakukan wawancara awal dengan beberapa narasumber yang dapat menjelaskan secara detail Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara mengenai teknis pengelolaan Kepulauan Karimunjawa serta untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara dalam menjalankan program-programnya untuk pengembangan pariwisata Karimunjawa.

Sesuai dengan pendapat Kepala Bidang Pengembangan Karimunjawa, Bapak Drs. Slamet Riyanto yang dalam hal ini memiliki tanggung jawab dalam pengembangan Karimunjawa, beliau mengatakan bahwa :

“Untuk pengembangan Karimunjawa, saat ini memang ada beberapa kesulitan. Karena Karimunjawa sendiri termasuk destinasi wisata baru di Jawa Tengah terutama di Jepara. Ketika melihat jumlah wisatawan, baik lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Karimunjawa pun masih sangat sedikit. Karena untuk menarik wisatawan agar berkunjung ke suatu destinasi harus dilakukan promosi yang bagus dan tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk pengembangan Karimunjawa memang membutuhkan banyak dana dan itu pula yang menjadi salah satu masalahnya. Selain itu, Karimunjawa sendiri letaknya cukup jauh dari Jepara meskipun masih dalam wilayah Jepara. Hal itu yang menyebabkan kami, yang dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara tidak dapat memantau secara langsung apa yang terjadi di Karimunjawa. Meskipun sebenarnya disana juga ada pegawai yang bertugas untuk mengelola wisma wisata. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara memiliki tugas untuk mengelola wisma wisata, kapal kaca, dan rumah adat Karimunjawa. Selain itu, ada hal lain pula yang sangat penting untuk menunjang pengembangan Pariwisata Karimunjawa yaitu pengadaan fasilitas penunjang pariwisata. Untuk fasilitas penunjang wisata, ada beberapa misalnya alat snorkling, perahu kaca, becak wisata, dan lain sebagainya. Fasilitas tersebut hanya diperuntukkan bagi pengunjung yang menginap di wisma wisata. Untuk

jumlahnya sebenarnya sudah cukup namun karena kurangnya pengawasan jadi banyak yang hilang. Selain itu, untuk kapal kaca hanya ada satu buah. Selain itu, kami juga terkendala ide-ide baru atau program-program baru yang dapat mendongkrak pariwisata Karimunjawa.” (Wawancara Tanggal 6 Februari 2014)

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala dan menghambat tercapainya tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara dalam rangka peningkatan pariwisata Karimunjawa, antara lain :

1. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Karimunjawa masih belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
KUNJUNGAN WISATAWAN KARIMUNJAWA
TAHUN 2013-2015

BULAN	TAHUN		
	2013	2014	2015
1	2	3	4
JANUARI	5.982	1.024	490
FEBRUARI	4.310	1.428	530
MARET	5.367	4.367	2.095
APRIL	5.301	9.608	9.750
MEI	6.754	2.092	3.013
JUNI	8.322	1.266	4.300
JULI	5.146	1.536	4.608
AGUSTUS	9.176	6.565	6.300
SEPTEMBER	4.214	10.865	6.500
OKTOBER	4.738	10.480	7.502
NOVEMBER	3.624	11.350	9.032
DESEMBER	4.634	10.500	10.560
	65.568	71.081	64.680

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa telah terjadi penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Karimunjawa pada

tahun 2015. Untuk jumlah wisatawan yang berkunjung pada tahun 2015 tersebut masih kurang dibandingkan dengan tahun 2013.

2. Belum tercapainya fungsi dari beberapa sarana wisata

Untuk pengembangan Obyek Wisata Karimunjawa, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara memiliki tugas untuk mengelola Wisma Wisata dan Rumah Adat Karimunjawa. Pada kenyataannya, untuk Rumah Adat Karimunjawa meskipun telah dibangun namun masih belum berfungsi sesuai rencana yang telah ditetapkan yaitu sebagai tempat penginapan. Ketika penulis melakukan peninjauan langsung ke Rumah Adat Karimunjawa tersebut memang masih sepi dan tidak ada penjaganya meskipun barang-barang yang didalamnya sudah lengkap.

Selain Rumah Adat Karimunjawa yang belum dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya, Kapal Kaca di Karimunjawa yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara juga hanya berjumlah satu buah dan sangat jarang digunakan.

3. Kurangnya ide-ide atau gagasan baru yang dapat menunjang peningkatan Pariwisata Karimunjawa

Program-program pariwisata yang menarik sangat menunjang dalam peningkatan pariwisata Karimunjawa. Pada kenyataannya, dalam pengembangan pariwisata Karimunjawa belum ada program-program baru yang khas dan menarik dari pariwisata Karimunjawa. Hal tersebut juga disampaikan oleh salah satu Staf dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Jepara dalam sebuah wawancara yang telah dilakukan oleh

Penulis, sebagai berikut :

“Kami memang mengakui belum banyak program-program baru yang dapat lebih meningkatkan pariwisata di Karimunjawa. Untuk program yang sudah ada seperti event sail, pentas seni, lomba mancing, dan lain sebagainya itu sebenarnya sudah bagus namun tetap masih belum bisa mendongkrak pariwisata di Karimunjawa. Mungkin kurangnya sumber daya yang benar-benar mengetahui secara dalam tentang pariwisata sehingga tidak dapat membuat gagasan-gagasan baru untuk memajukan pariwisata di Karimunjawa.” (Wawancara Tanggal 6 Februari 2014)

Dalam teorinya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, Agus Dwiyanto, dkk (2002:83) menyatakan bahwa kinerja pelayanan publik di Indonesia, pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia. Apabila dilihat dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, ada beberapa faktor yang menurut penulis dapat mempengaruhi kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia menjadi faktor utama yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi. Karena Sumber Daya Manusia disini berhubungan erat dengan pegawai sebagai motor penggerak suatu organisasi. Penulis telah melakukan wawancara pendahuluan dengan salah satu staf serta melihat secara langsung Sumber Daya Manusia yang dalam hal ini adalah pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara yang menjadi pengelola Wisma Wisata, Kapal Kaca, serta Rumah Adat Karimunjawa.

pegawai yang ditugaskan untuk mengelola di Karimun Jawa hanya ada dua orang.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan suatu organisasi. Untuk mencapai keberhasilan program-program suatu organisasi memang dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.

pengembangan Obyek Wisata Karimun Jawa sendiri Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara hanya mengelola Wisma Wisata dan Rumah Adat Karimun Jawa. Jadi memang tidak ada lokasi wisata khusus yang dikelola. Untuk menunjang pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara juga telah menyediakan fasilitas yang dapat digunakan oleh wisatawan yang menginap di Wisma Wisata. Fasilitas tersebut antara lain :

Tabel 1.3

FASILITAS PENUNJANG PARIWISATA KARIMUNJAWA

NO.	FASILITAS	JUMLAH
1	2	3
1.	Alat Snorkling	30 Paket
2.	Kapal Kaca	1 Kapal

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara

Berdasarkan tabel diatas, ada beberapa fasilitas yang disediakan untuk menunjang kegiatan pariwisata. Untuk jumlah alat snorkling yaitu terdapat 30 paket yang dalam setiap paketnya berisi kaca mata renang, sepatu katak, pipa udara, dan *life jacket*. Jika hanya digunakan hanya untuk tamu wisma wisata, 30 paket tersebut memang sudah cukup. Namun untuk pengadaan

kapal kaca yang hanya satu buah tentu sangat tidak memungkinkan untuk menampung tamu wisma wisata. Berdasarkan wawancara dengan pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, kapal kaca tersebut bukan untuk semua wisatawan yang menginap di wisma wisata namun kapal kaca tersebut hanya digunakan untuk tamu-tamu khusus.

Pemaparan tersebut menunjukkan ada beberapa permasalahan yang terdapat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jepara. Apabila hal tersebut dibiarkan, tentu akan memberikan dampak yang negatif pada hasil kerja yang diberikan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Hasil kerja yang kurang baik, tentunya akan menyebabkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jepara tidak akan dapat mencapai visi dan misinya. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KINERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA DALAM UPAYA PENGEMBANGAN OBYEK WISATA KARIMUNJAWA”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara dalam upaya pengembangan Obyek Wisata Karimunjawa ?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara dalam upaya pengembangan Obyek Wisata Karimunjawa ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara dalam upaya pengembangan Obyek Wisata Karimunjawa.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara dalam upaya pengembangan Obyek Wisata Karimunjawa.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

1. Bagi Instansi
 - a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan penerapan tanggung jawab sosial secara efektif bagi instansi-instansi di Indonesia.
 - b. Diharapkan dapat memperbaiki kinerja dari instansi terkait.

2. Bagi Universitas

Sebagai tambahan bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.

3. Bagi Peneliti

Penyusunan tugas ini diharapkan dapat memperluas wawasan berfikir serta pengetahuan penulis dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan yang sudah diperoleh untuk dilaksanakan di lapangan.

1.5 KERANGKA TEORI

1.5.1 ADMINISTRASI PUBLIK

Peneliti akan mengemukakan pengertian Administrasi Publik menurut para ahli yang dikutip oleh Inu Kencana (2006:24) dalam buku yang berjudul Ilmu Administrasi Publik sebagai berikut:

Menurut Prajudi Atmosudirjo (1982:272) dalam buku *Administrasi dan Manajemen Umum* mengatakan: “Administrasi Publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.”

Menurut Arifin Abdurachman (1959:2) dalam buku *Majalah Administrasi Negara* mengemukakan bahwa: “Administrasi Publik adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik Negara.”

Pengertian administrasi publik diatas menjelaskan bahwa administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari badan atau lembaga politik-politik dari suatu Negara.

Menurut Dwight Waldo (1955) dalam buku *The Study of Public Administration* sebagai berikut: “Administrasi Publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.”

Pengertian administrasi publik diatas menjelaskan bahwa manajemen dan suatu organisasi yang terdiri dari beberapa manusia dan peralatan dan lain sebagainya yang bisa dikembangkan untuk mencapai tujuan pemerintah.

Beberapa pendapat ahli diatas mengenai administrasi publik dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang pelaksanaan suatu negara untuk mencapai tujuan negara tersebut. Dalam pembelajaran administrasi publik, terbagi dalam dua konsentrasi yaitu Kebijakan Publik dan Manajemen Publik.

Penulis dalam penelitian ini meneliti tentang Kinerja suatu organisasi yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara. Oleh karena itu, penelitian ini terkonsentrasi pada manajemen publik.

1.5.2 MANAJEMEN PUBLIK

Manajemen menurut Stoner dan Wakel dalam pasolong (2007:82) adalah sebagai berikut :

“Proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.”

Menurut Yeremias T. Keban mengartikan :

“Manajemen Publik sebagai upaya untuk menunjuk pada manajemen instansi pemerintah.”

Donovan dan Jackson dalam pasolong (2007:82) mendefinisikan manajemen sebagai proses yang dilaksanakan pada tingkat organisasi tertentu, sebagai rangkaian keterampilan (*skills*), dan sebagai serangkaian tugas. Dengan menggunakan pendapat Boyatzis dalam Keban. Ketiga pengarang ini mengemukakan empat klaster kompetensi yang ada dalam manajemen yaitu :

- 1) Klaster manajemen tujuan dan aksi yang terdiri atas orientasi efisiensi, tindakan proaktif, kepedulian terhadap dampak, dan penggunaan diagnostic terhadap konsep-konsep,
- 2) Klaster pengarahan terhadap bawahan yaitu penggunaan kekuasaan unilateral, pengembangan yang lain dan spontanitas,
- 3) Klaster manajemen sumber daya manusia yaitu penggunaan dalam melakukan sosialisasi, mengelola kelompok, persepsi positif, objektivitas persepsi, penilaian diri yang akurat, pengendalian diri, stamina dari kemampuan menyesuaikan diri, dan

- 4) Klaster kepemimpinan yaitu mengembangkan percaya diri, konseptualisasi, pemikiran yang logis, dan penggunaan presentasi lisan.

Pada dasarnya manajemen publik merupakan sistem perencanaan hingga pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan publik. Overman dalam pasolong (2007:83), mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah “*scientific management*”, walaupun dipengaruhi oleh “*scientific management*”. Manajemen publik bukanlah “*policy analysis*”, bukanlah juga administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi “*rational-instrumental*” pada satu pihak dan orientasi politik kebijakan lain. Manajemen publik merupakan studi interdisipliner dari spek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain. Berdasarkan pendapat Overman tersebut, OTT, Hyde dan Shafritz dalam pasolong (2007:83) mengemukakan bahwa manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang administrasi publik yang tumpang tindih. Tapi untuk membedakan keduanya secara jelas maka dikemukakan bahwa kebijakan publik merefleksikan sistem otak dan syaraf, sementara manajemen publik merepresentasikan sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia. Dengan kata lain, manajemen publik merupakan proses menggerakkan SDM dan non SDM sesuai perintah kebijakan publik.

1.5.3 Kinerja

Kinerja merupakan suatu konstruk (*construct*) yang bersifat multidimensional, pengukurannya juga bervariasi tergantung pada kompleksitas faktor-faktor yang membentuk kinerja.

Dalam Yeremias T. Keban (2004: 191) kinerja merupakan terjemahan dari *performance* yang sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai “penampilan”, “unjuk kerja”, atau “prestasi”. Secara etimologis, kinerja merupakan sebuah kata yang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “kerja” yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi, bisa pula berarti hasil kerja. Sehingga pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan (www.wikipedia.com).

Berbeda dengan Bernardin dan Russel dalam Yeremias T. Keban (2004 : 192) mengartikan kinerja sebagai *therecord of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time period*. Dalam definisi tersebut aspek yang menjadi pokok pemikiran adalah catatan tentang *outcome* atau hasil akhir yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktivitas dijalankan selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian, kinerja tersebut hanya mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh seorang pegawai selama kurun waktu tertentudan tidak termasuk atau bukan merupakan karakteristik pribadi pegawai yang dinilai.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan bahwa kinerja berarti: (1) sesuatu yang dicapai, (2) prestasi yang diperlihatkan, (3) kemampuan kerja. Menurut Otley dalam Mahmudi (2005: 8) kinerja mengacu pada sesuatu yang

terkait dengan kegiatan melakukan pekerjaan, dalam hal ini hasil yang dicapai kerja tersebut.

Menurut Rogers (dalam Mahmudi 2005:8) beberapa pihak berpendapat bahwa kinerja mestinya didefinisikan sebagai hasil kerja itu sendiri (outcomes of work), karena hasil kerja memberikan keterkaitan yang kuat terhadap tujuan-tujuan strategik organisasi, kepuasan pelanggan, dan kontribusi ekonomi.

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Kinerja organisasi merupakan totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut (Harbani Pasolong 2008: 175)

Ada berbagai pendapat tentang kinerja, seperti dikemukakan oleh Rue & Byars (dalam Harbani Pasolong 2008: 175) mengatakan bahwa kinerja adalah sebagai tingkat pencapaian hasil sedangkan menurut Widodo (dalam Harbani Pasolong 2008:175) kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

Prawirosentono (dalam Harbani Pasolong 2008: 176), mengatakan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-

masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Gilbert (dalam Notoatmojo 2009: 124) mendefinisikan kinerja adalah apa yang dapat dikerjakan oleh seseorang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai kinerja diatas, penulis mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut dalam hal ini adalah organisasi pemerintah yang tujuannya tertuang dalam visi dan misi. Hasil kerja tersebut harus sesuai dengan target yang telah ditentukan bersama dalam sebuah organisasi. Namun, kinerja juga tidak hanya dalam lingkup kinerja individu namun juga kinerja organisasi yang dasarnya adalah dari kinerja individu.

1.5.4 Kinerja Organisasi

Pada uraian sebelumnya tentang kinerja telah disimpulkan bahwa kinerja sebagai hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut dalam hal ini adalah organisasi pemerintah yang tujuannya tertuang dalam visi dan misi. Hasil kerja tersebut harus sesuai dengan target yang telah ditentukan bersama dalam sebuah organisasi. Dalam Masa Sembiring (2012: 12),

David Charrington (dalam Masana Sembiring 2012: 12) mengemukakan bahwa organisasi adalah sistem sosial yang memiliki pola kerja yang teratur yang didirikan oleh manusia dan beranggotakan sekelompok manusia dalam rangka

untuk mencapai satu set tujuan tertentu. Pendapat lain yaitu dari S. Prajudi Atmosudirjo (dalam Wursanto 2005 : 53) mendefinisikan organisasi yaitu sebagai struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang-orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu.

Pendapat dari Masana Sembiring (2012 : 82) menggambarkan kinerja organisasi sebagai sistem yang terdiri dari *input, process, output, dan feedback* yang saling berhubungan satu sama lain. Masana Sembiring disini juga menjelaskan tentang kinerja organisasi merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara para anggota atau komponen dalam organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.

Kinerja organisasi mempunyai banyak pengertian. Wibawa dan Atmosudirdjo (dalam Pasolong 2008: 176), mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja mempunyai beberapa elemen yaitu:

1. Hasil kerja dicapai secara individual atau secara institusi, yang berarti kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau kelompok.

2. Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan wewenang dan tanggungjawab, yang berarti orang atau lembaga diberikan hak dan kekuasaan untuk ditindaklanjuti, sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik.
3. Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam melaksanakan tugas individu atau lembaga tentu saja harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan
4. Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral atau etika, artinya selain mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut haruslah sesuai dengan moral dan etika yang berlaku umum.

Kinerja organisasi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap anggota organisasi. Apabila kinerja anggota organisasi baik maka diharapkan kinerja organisasi juga baik.

1.5.5 Pengukuran Kinerja

Menurut Sudarmanto (2009: 11) Dimensi atau indikator kinerja merupakan aspek-aspek yang menjadi ukuran dalam menilai kinerja. Ukuran-ukuran dijadikan tolok ukur dalam menilai kinerja. Dimensi ataupun ukuran kinerja sangat diperlukan karena akan bermanfaat baik bagi banyak pihak.

Menurut Robertson (2002) dalam Mahmudi (2005: 7) Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa,

perbandingan hasil kegiatan dengan target dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Tujuan pengukuran kinerja organisasi sektor publik dikemukakan oleh Mahmudi (2007: 14) dalam Masana Sembiring (2012: 85) adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi
2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
3. Memperbaiki kinerja periode berikutnya
4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment
5. Memotivasi pegawai
6. Menciptakan akuntabilitas publik

Armstrong dalam Sudarmanto (2009: 13) menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan hal yang sangat penting untuk dapat memperbaiki pelaksanaan kerja yang dapat dicapai. Menurutnya ada 4 jenis ukuran kinerja, yaitu :

- a. Ukuran uang, yang mencakup pendapatan, pengeluaran, dan pengembalian (*rate of return*)
- b. Ukuran upaya atau dampak, yang mencakup pencapaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayanan, serta kemampuan mempengaruhi perilaku rekan kerja dan pelanggan
- c. Ukuran reaksi, yang menunjukkan penilaian rekan kerja, pelanggan, atau pemegang pekerjaan lainnya.
- d. Ukuran waktu, yang menunjukkan pelaksanaan kinerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respons, atau jumlah pekerjaan sasaran

Dwiyanto dalam Pasolong (2008: 176), menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu sebagai berikut:

1. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian General Accounting office (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan salah satu indikator kinerja yang penting. Sedangkan yang dimaksud dengan produktivitas menurut Dewan Produktivitas Nasional, adalah suatu sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini (harus) lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini.
2. Kualitas Layanan, yaitu: cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas. Dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas

pelayanan sering kali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja birokrasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi indikator untuk menilai kinerja birokrasi publik.

3. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidaksiharasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan birokrasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.
4. Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang

eksplisit maupun implisit menurut Lenvine dalam Dwiyanto (2006:51). Oleh sebab itu, tanggung jawab bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan tanggung jawab.

5. Akuntabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya ialah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan publik. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik itu konsisten dengan kehendak publik. Kinerja birokrasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dilihat dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan birokrasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Selanjutnya Kumorotomo dalam Sudarmanto (2009: 16) merumuskan 4 indikator penilaian terhadap kinerja organisasi, yaitu :

- a. Efisiensi: menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomi

- b. Efektivitas: menyangkut rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan
- c. Keadilan: menyangkut distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan organisasi pelayanan publik
- d. Daya tanggap: daya tanggap terhadap kebutuhan vital masyarakat, dan dapat dipertanggung jawabkan secara transparan

Pada konteks kinerja organisasi publik, Lembaga Administrasi Negara (2000) telah mengembangkan konsep dan ukuran kinerja cukup operasional. Menurut LAN (2000), pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan akuntabilitas. LAN menetapkan 5 indikator organisasi yang telah dijadikan pedoman dan panduan bagi organisasi publik dalam menyusun laporan kinerja, yaitu :

- a. Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran, seperti : orang, dana, waktu, material, dan lain-lain.
- b. Keluaran adalah segala sesuatu yang berupa produk atau jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- c. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

- d. Manfaat adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung masyarakat. Manfaat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- e. Dampak adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan, atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator tersebut dapat digunakan untuk evaluasi, baik dalam perencanaan, tahap pelaksanaan, ataupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

1.5.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Soesilo dalam Hessel Nogi (2005 : 180), kinerja suatu organisasi dipengaruhi adanya faktor-faktor berikut :

- a. Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi
- b. Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi;
- c. Sumber daya manusia, yang berhubungan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal
- d. System informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan data base untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi.
- e. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap aktivitas organisasi

Selanjutnya Agus Dwiyanto, dkk (2002:83) dalam bukunya yang berjudul Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, menyatakan bahwa kinerja pelayanan publik di Indonesia, pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:

1. Faktor internal meliputi :

a. Sarana

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Mengenai sarana dan prasarana yang dimaksud di atas berikut ini akan diuraikan istilah sarana kerja / fasilitas kerja yang ditinjau dari segi kegunaan menurut Moenir (2000:120) membagi sarana dan prasarana sebagai berikut :

- Peralatan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi langsung sebagai alat produksi untuk menghasilkan barang atau berfungsi memproses suatu barang yang berlainan fungsi dan gunanya.
- Perlengkapan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi sebagai alat pembantu tidak langsung dalam produksi, mempercepat proses, membangkitkan dan menambah kenyamanan dalam pekerjaan.

- Perlengkapan bantu atau fasilitas, yaitu semua jenis benda yang berfungsi membantu kelancaran gerak dalam pekerjaan, misalnya mesin ketik, mesin pendingin ruangan, mesin absensi, dan mesin pembangkit tenaga.

b. Sumber daya manusia

Organisasi hidup di dalam lingkungan yang secara terus-menerus mempengaruhi keberadaan dan kelangsungan hidupnya. Untuk hal ini, organisasi haruslah senantiasa melakukan upaya-upaya yang dapat memperkuat keberadaannya di dalam lingkungannya. Upaya yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan memberikan nilai tambah bagi lingkungannya melalui penyampaian berbagai *output* yang dihasilkan.

c. Koordinasi antar unit

Koordinasi merupakan suatu hal yang harus dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat menghasilkan sasaran dan tujuan suatu organisasi. Koordinasi dalam suatu organisasi hendaknya dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

2. Faktor eksternal, meliputi:

a. Pengguna jasa

Berdasarkan pendapat Soebijanto (1998:18) dikutip Agus Dwiyanto, “kadang kala pengguna jasa menghalalkan segala cara untuk menyelesaikan urusannya meskipun melanggar peraturan,

seperti kasus pengurusan izin administrasi apabila data tidak lengkap maka tidak diproses.”

b. Kelengkapan administrasi

Kelengkapan administrasi (dokumen) merupakan salah satu faktor pendukung yang mampu meningkatkan kinerja, baik itu kinerja individu maupun kinerja organisasi itu sendiri.

c. Koordinasi dengan instansi lain

Koordinasi yang dilakukan dengan instansi lain (pemerintah setempat) harus berkesinambungan karena suatu organisasi saling terkait oleh aturan-aturan., demi untuk peningkatan kinerja suatu organisasi.

1.6 FENOMENA PENELITIAN

Kinerja organisasi merupakan pencapaian target yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Dalam hal ini, kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara merupakan hasil pencapaian target dan visi misi yang telah ditentukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara dalam upaya pengembangan Obyek Wisata Karimunjawa.

Dwiyanto dalam Pasolong (2008: 176) mengemukakan bahwa terdapat 5 dimensi untuk mengukur kinerja organisasi, yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsiitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Oleh karena itu, peneliti menentukan fenomena kinerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara yang akan diamati adalah sebagai berikut :

1. Produktivitas

Produktivitas merupakan ratio antara input dan output. Hal tersebut merupakan hasil yang didapatkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara yang dapat dilihat melalui :

- Kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam upaya peningkatan Obyek Wisata Karimunjawa
- Gagasan-gagasan baru yang digunakan untuk mengembangkan Obyek Wisata Karimunjawa
- Ketercapaian target yang telah ditentukan dalam kurun waktu tertentu

2. Kualitas Layanan

Kualitas layanan merupakan sesuatu yang berhubungan dengan produk, jasa, dan protes yang diberikan kepada masyarakat yang dalam hal ini untuk pengembangan Obyek Wisata Karimunjawa.

- Bentuk pelayanan pariwisata yang diberikan kepada masyarakat terkait perkembangan Obyek Wisata Karimunjawa

3. Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat.

- Kerjasama antar pegawai
- Kecepatan dalam mengenali kebutuhan masyarakat

4. Responsibilitas

Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara mengenai Pengembangan Pariwisata Karimunjawa dilakukan sesuai dengan prinsip dan kebijakan yang telah dtentukan.

- Kesesuaian antara kinerja dengan rencana kerja

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja organisasi publik merupakan sebuah bentuk pertanggung jawaban kepada publik. Hal ini digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Jepara konsisten dengan kehendak masyarakat.

- Bentuk pertanggung jawaban Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara

Faktor-faktor yang mendukung kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan suatu hal yang utama yang menunjang kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara. Hal tersebut dapat dilihat melalui :

- Jumlah sumber daya manusia (pegawai) yang dibutuhkan
- Tingkat pendidikan pegawai
- Daya tanggap pegawai terhadap tugas atau pekerjaannya
- Pengetahuan pegawai dalam bidang pekerjaannya

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara untuk meningkatkan pariwisata di karimunjawa.

- Ketersediaan sarana penunjang pariwisata di Karimunjawa
- Kualitas sarana dan prasarana penunjang pariwisata di Karimunjawa

{Tabel 1.4}

FENOMENA PENELITIAN

No.	Permasalahan	Pengukuran Kinerja menurut Dwiyanto	Fenomena yang diteliti	Faktor-faktor yang Mendukung
1	2	3	4	5
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Karimunjawa masih belum maksimal. - Belum tercapainya fungsi dari beberapa sarana wisata - Kurangnya ide-ide atau gagasan baru yang dapat menunjang peningkatan Pariwisata Karimunjawa 	Produktivitas	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam upaya peningkatan Obyek Wisata Karimunjawa - Gagasan-gagasan baru yang digunakan untuk mengembangkan Obyek Wisata Karimunjawa - Ketercapaian target yang telah ditentukan dalam kurun waktu tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sumber Daya Manusia b. Sarana dan Prasarana
2.		Kualitas Layanan	Bentuk pelayanan pariwisata yang diberikan kepada masyarakat terkait perkembangan Obyek Wisata Karimunjawa	
3.		Responsivitas	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama antar pegawai - Kecepatan dalam mengenali kebutuhan masyarakat 	
4.		Responsibilitas	- Kesesuaian antara kinerja dengan rencana kerja	
5.		Akuntabilitas	- Bentuk pertanggung jawaban Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara	

1.7 METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2009 : 2). Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu *rasional, empiris, dan sistematis*. Penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia adalah *rasional*. Cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sedangkan sistematis merupakan proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Dalam Sugiyono (2009: 2) data yang diperoleh melalui penelitian adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti.

Penelitian terdiri dari dua metode, yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Dalam Lexy J. Moleong (2010: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2009: 7-8).

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (sugiyono, 2009: 8)

Melalui penelitian, manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum, data yang diperoleh data yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi (Sugiyono: 2009: 3)

1.7.1 Desain Penelitian

Penelitian merupakan proses atau langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh jawaban atas pemecahan masalah atas pertanyaan dari fenomena-fenomena yang ada dan perlu digaris bawahi bahwa dalam sebuah penelitian diperlukan suatu metode agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik maka kita sangat perlu mempertimbangkan mengenai apa yang akan kita amati, mengapa kita harus mengamati hal tersebut dan bagaimana cara untuk melakukan hal tersebut. Untuk itulah kita harus mempersiapkan desain penelitian. Adanya desain penelitian maka dapat membantu atau memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara Dalam Upaya Pengembangan Obyek Wisata Karimunjawa yang kompleks dan tidak bertujuan membuat hipotesa serta hubungan antar fenomena, maka penelitian ini dapat digolongkan ke dalam tipe penelitian deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif ini mempunyai tujuan menggambarkan sasaran yang tepat, sifat-sifat individu, keadaan gejala-gejala dari kelompok tertentu. Data pada penelitian deskriptif tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *video*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Pada penulisan laporan, peneliti harus bisa menganalisis data yang sangat kaya tersebut dengan baik dan sesuai dengan bentuk aslinya.

1.7.2 Situs Penelitian

Lokasi Penelitian yang akan dilakukan adalah di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara. Alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah aksesibilitas, dimana lokasi penelitian merupakan lokasi dimana peneliti melakukan kegiatan magang, sehingga peneliti telah memiliki akses dalam melakukan penelitian. Selain itu, peneliti memilih Kepulauan Karimunjawa adalah karena Karimunjawa merupakan aset pariwisata bagi Kabupaten Jepara yang jika dikembangkan dengan baik dapat menjadi destinasi wisata bertaraf internasional. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara bertanggung jawab dalam mengelola pariwisata di Kabupaten Jepara termasuk Kepulauan Karimunjawa.

Alasan penulis berfokus pada kinerja adalah untuk mengetahui sejauh mana kinerja dari Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Jepara dalam upaya pengembangan Obyek Wisata Karimunjawa yang memang masih sangat baru bagi masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah wisatawan baik wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Karimunjawa dapat dikatakan masih sangat kurang. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka dibutuhkan kerja yang maksimal. Untuk mencapai kinerja yang maksimal harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara harus kerja keras untuk menarik minat wisatawan agar berkunjung ke Obyek Wisata yang ada di Jepara khususnya Obyek Wisata Karimunjawa. Hal tersebut dilakukan agar target yang telah ditentukan bersama tersebut dapat dipenuhi.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam konsep penelitian merujuk pada responden, informan yang hendak diminta informasi atau digali datanya, sedangkan objek merujuk pada masalah atau tema yang sedang diteliti. Dalam pelaksanaan penelitian, subyek penelitian yang penulis lakukan adalah pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara yang mengetahui atau memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengembangan Obyek Wisata Kepulauan Karimunjawa.

Untuk menentukan subjek penelitian ini menggunakan *snowball sampling*. *Snowball sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, dan lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2009:219). Hal tersebut dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar (Sugiyono,2009: 219).

Informan tersebut berperan sebagai titik awal penarikan sampel. Informan Kunci adalah Bapak Drs. Slamet Riyanto sebagai Kepala Bidang Pengembangan Karimunjawa. Harapannya adalah Kepala Bidang dapat memberikan rekomendasi orang-orang yang sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah disusun untuk pengembangan Obyek Wisata Karimunjawa.

Informan, selanjutnya ditetapkan berdasarkan petunjuk dari informan sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan kunci yang mengetahui, melaksanakan serta mengkoordinir tugas pokok dan fungsi Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara dalam upaya pengembangan Obyek Wisata Karimunjawa dalam hal ini adalah tugas pokok dan fungsi dari Bidang Pengembangan Karimunjawa.

1.7.4 Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Dalam Lexy J. Moleong (2010: 168) menyatakan bahwa :

“Kedudukan peneliti dalam penilaian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya”.

Dalam Lexy J. Moleong (2010: 169) Ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen mencakup segi responsif, dapat menyesuaikan diri, menekankan kejujuran, mendasarkan diri atas pengetahuan, memproses dan mengikhtisarkan, dan memanfaatkan kesempatan mencari respons yang tidak lazim.

Salah satu cara untuk menunjang kelancaran dalam pengumpulan data, maka peneliti memerlukan instrument lain sebagai alat bantu untuk menunjang kelancaran seperti alat perekam, buku catatan, dan kamera dalam pengumpulan data.

1.7.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. *Data Primer*, adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari informan atau data hasil interview dengan informan. Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang merupakan sumber informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui kinerja pegawai serta aspek-aspek yang mendukung dan menghambat kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara
2. *Data Sekunder*, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian melalui dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen disini berupa buku-buku, artikel-artikel, serta literature lainnya.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu usaha untuk mendapatkan yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan untuk pembahasan dan pemecahan masalah. Untuk mendapatkan data-data penelitian tersebut, teknik yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. *Interview* atau wawancara, merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Moleong, 2010: 186). Dalam penelitian ini dilakukan wawancara pembicaraan informal. Pada jenis wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara dalam hal ini adalah peneliti itu sendiri. Pertanyaan yang diajukan juga tergantung dari spontanitas. Meskipun telah menyiapkan

pertanyaan-pertanyaan, namun tetap bisa diganti atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara. Dengan melakukan wawancara maka diharapkan agar peneliti mengetahui lebih dalam tentang focus penelitian.

2. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data-data dari buku-buku, internet, tulisan-tulisan serta referensi lain yang sesuai atau relevan dengan tujuan penelitian.
3. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data oleh peneliti yang dilakukan dengan cara pengamatan dan terlibat dalam kegiatan dari subjek yang akan diteliti.
4. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen aktual yang berkaitan dengan objek penelitian yang dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, selain itu bentuk dari dokumentasi itu sendiri adalah berupa artikel dari surat kabar, foto, catatan, notulen surat, buku, agenda, serta laporan yang sesuai dengan permasalahan penelitian

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Data yang diperoleh dari berbagai macam sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus hingga datanya penuh. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2009: 246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Menurut Sugiyono (2009:244) mengatakan :

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam proses pengolahan data yaitu bergerak diantara perolehan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Secara sistematis dijelaskan oleh Miles dan Huberman sebagai berikut:

1. Reduksi data, merupakan proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari hasil penelitian di lapangan. Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode-kode pada aspek tertentu (Sugiyono, 2009: 247)
2. Penyajian data, diartikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun dan member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan-kesimpulan, dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2009: 249) menyarankan dalam melakukan penyajian data, selain dengan

teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jaringan kerja), dan *chart*.

3. Penarikan Kesimpulan, hal ini merupakan langkah terakhir dalam analisa data kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori (Sugiyono, 2009:253)

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis data peneliti menggunakan teknik Analisis Domein. Analisis Domein dilakukan terhadap data yang diperoleh dari pengamatan berperan serta atau wawancara atau pengamatan deskriptif yang terdapat dalam catatan lapangan (Moleong, 2010: 305).

Dalam Moleong (2010: 305) ada enam tahap yang dilakukan dalam analisis domein yaitu :

1. Memilih salah satu hubungan semantik untuk memulai dari Sembilan hubungan semantik yang tersedia: hubungan termasuk, spasial, sebab-akibat, rasional, lokasi tempat bertindak, fungsi, alat-tujuan, urutan, dan member atribut atau member nama
2. Menyiapkan lembar analisis domein
3. Memilih salah satu sampel catatan lapangan yang dibuat terakhir, untuk memulainya
4. Mencari istilah acuan dan istilah bagian yang cocok dengan hubungan semantik dari catatan lapangan

5. Mengulangi usaha pencarian domein sampai semua hubungan semantik habis
6. Membuat daftar domein yang ditemukan (teridentifikasi)

1.7.8 Kualitas Data

Pengecekan terhadap kualitas data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut dilakukan karena untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Pengecekan kualitas data harus dilakukan secara cermat dan dengan teknik yang tepat. Dengan kecermatan dan teknik yang tepat maka akan diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam mendapatkan kualitas data. Dalam Moleong (2010: 330) triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Menurut Patton (dalam Moleong 2010: 330-331) Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut :

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi

- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.